

A. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Pengukuran Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		KINERJA TAHUN 2024			DUKUNGAN ANGGARAN TAHUN 2024			FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT KEBERHASILAN KINERJA	PENANGGUNGJAWAB
				Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%		
1.	Meningkatnya Pendapatan Daerah	1.1	Persentase Pencapaian Penerimaan PAD	91,970	95,990	104,371	500.000.000	454.936.040	90,98	Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90% 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Upaya <i>cross-cutting</i> bersama stakeholder Kepolisian dan Jasaraharja dalam penerimaan pajak PKB dan BBN-KB sudah optimal dengan penggunaan anggaran yang efisien 3. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja <u>Faktor Pendukung :</u> 1. Pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan (OPAD) telah memberikan kontribusi nyata dalam mencapai kinerja pencapaian penerimaan PAD diatas 90%, e kinerja pegawai dengan SKP memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja 2. Pelaksanaan door to door service cukup efektif sebagai aktivitas nyata dalam rencana aksi AKIP 3. Kolaboratif baik internal dan eksternal bagi upaya peningkatan kinerja organisasi 4. Memanfaatkan teknologi untuk mempermudah transaksi pembayaran pajak daerah seperti, pembayaran secara non tunai menggunakan mesin EDC, QRIS serta pengembangan pembayaran pajak melalui modern kanal 5. Sosialisasi secara massif terhadap pembayaran pajak daerah cukup signifikan 6. Pelaksanaan operasi gabungan dengan pihak Kepolisian, Dishub dan Sat Pol PP berjalan cukup efektif	Kepala Badan
2.	Meningkatnya Kemandirian Daerah Dalam Pembangunan Yang Bersumber Pada Pendanaan PAD	2.1	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD Dalam Batas Toleransi (Nilai absolut)	4,00	3,770	94,25	312.400.000	289.937.838	92,81	Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90% 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Tagging pendanaan pembangunan melalui PAD pada APBD telah tepat sasaran	Kepala Badan

										<u>Faktor Pendukung :</u> 1. Memberikan program penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan bunga Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2. Pembentukan Satgas PBB-KB pada perairan/laut di Provinsi Sumatera Selatan 3. Integrasi data wajib pajak pusat dengan data wajib pajak daerah pada Dirjen Pajak Kementerian Keuangan 4. Perpanjangan kerjasama dengan BP Batam dalam rangka back up database server utama yang ada main/recovery data	
3.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	3.1	Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	0,950	0,925	97,36	980.000.000	826.114.390	84,29	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Koordinasi dan konsultasi secara intensif dengan Kementerian ESDM terkait dengan dana bagi hasil Migas <u>Faktor Pendukung :</u> 1. Terus melakukan rapat koordinasi dengan OPD pemungut retribusi dan BUMD/BUMS yang menerima penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara rutin 2. Memperkuat sistem informasi teknologi secara bertahap terus membenahi sistem IT melalui kerjasama dengan pihak ketiga 3. Meningkatkan pengawasan internal badan dan melakukan koordinasi dengan institusi pengawasan lainnya	Kepala Badan
		3.2	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	1,000	0,945	94,500	840.000.000	728.735.374	86,75	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Belanja produktif dengan tematik tertentu dapat meningkatkan PDRB per kapita 3. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja	Kepala Badan

										<u>Faktor Pendukung :</u> 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah 2. Kerjasama dengan pemerintah Kab/Kota untuk berkontribusi dalam Optimalisasi Pajak Daerah 3. Memperluas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penambahan titik pelayanan baru seperti samsat desa dan samsat drive thru	
4.	Meningkatnya Rasio Pajak Daerah	1.1	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap GDP	1,500	1,389	93,920	840.000.000	728.735.374	86,75	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Belanja dalam rangka penguatan pajak daerah 3. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja <u>Faktor Pendukung :</u> 1. Penguatan local taxing power dengan relaksasi kebijakan pajak daerah 2. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan penguatan indeks kemandirian fiskal daerah 3. Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah 4. Diseminasi informasi pajak melalui sosial media dan media elektronik lainnya	Bidang Pajak
5.	Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	1.1	Persentase Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	14,260	13,260	92,987	1.140.000.000	1.091.578.054	95,75	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Program keringan pajak daerah dan insentif pajak daerah menstimulus PAD 3. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja <u>Faktor Pendukung :</u> 1. Kerjasama kolaboratif bersama Agen Pemegang Merk Tunggal (ATPM) kendaraan bermotor 2. Kerjasama dengan Camat, Lurah dan Ketua RT setempat dalam rangka penagihan pajak daerah 3. Kerjasama dengan Dirlantas melalui kegiatan razia kendaraan bermotor 4. Program kredit murah bagi masyarakat ekonomi	Bidang Pajak

										menengah ke bawah dalam keringanan berusaha	
6.	Berkurangnya Doleansi Pajak Daerah	1.1	Persentase berkurangnya pengajuan doleansi pajak	5,30	4,872	91,925	310.000.000	235.169.965	75,86	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Program keringan pajak daerah dan insentif pajak daerah menstimulus PAD 3. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja <u>Faktor Pendukung :</u> 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui pendidikan formal dan informal secara bertahap 2. Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor telah di update dalam system informasi pembayaran pajak daerah 3. Mengendalikan tindak pengendalian atas perhitungan beban tariff pajak, denda pajak dan bunga pajak 4. Kolaboratif bersama dengan pihak Kepolisian dalam penertiban kendaraan bermotor	Bidang Pajak
7.	Berkurangnya Kesalahan Dalam Ikhtisar Pembukuan Pajak Daerah	1.1	Persentase meningkatnya ketelitian ikhtisar pembukuan pajak	100,00	93,360	93,360	50.000.000	44.311.538	88,62	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Program keringan pajak daerah dan insentif pajak daerah menstimulus PAD 3. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 4. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) <u>Faktor Pendukung :</u> 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui pendidikan formal dan informal secara bertahap 2. Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor telah di update dalam system informasi pembayaran pajak daerah 3. Mengendalikan tindak pengendalian atas	Bidang Pajak

										perhitungan beban tariff pajak, denda pajak dan bunga pajak 4. Kolaboratif bersama dengan pihak Kepolisian dalam penertiban kendaraan bermotor	
8.	Meningkatnya Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain Dalam APBD	1.1	Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain	94,97	89,724	94,476	135.000.000	106.199.144	78,66	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 3. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 4. Perubahan rencana kerja memastikan ketercapaian kinerja dengan dukungan anggaran <u>Faktor Pendukung :</u> 1. Terus melakukan rapat koordinasi dengan OPD pemungut retribusi dan BUMD/BUMS yang menerima penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara rutin 2. Mengupayakan peningkatan penerimaan dari masing- masing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain dalam bentuk peningkatan penyertaan modal kepada masing-masing BUMD di lingkungan Pemerintah Sumatera Selatan 3. Mengadakan koordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan guna mencari upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah dari bagi hasil laba BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Bidang PDLL
9.	Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah	1.1	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Retribusi Terhadap Target	89,14	86,334	96,852	45.000.000	40.149.260	89,22	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 3. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 4. Evaluasi terhadap penggunaan program,	Bidang PDLL

										kegiatan serta sub kegiatan pendanaan <u>Faktor Pendukung :</u> 1. Kolaboratif bersama 17 OPD Pengampu Retribusi 2. Sosialisasi secara massif terhadap objek retribusi daerah 3. Memberikan akses kemudahan bagi masyarakat yang akan memanfaatkan objek retribusi antara lain dukungan penyediaan sarana dan prasarana transportasi menuju objek retribusi 4. Memperbaiki sarana dan prasarana objek retribusi	
10.	Meningkatnya Pendapatan dari Penerimaan Bagi Hasil	1.1	Persentase Meningkatnya Penerimaan Bagi Hasil	83,48	79,633	95,392	190.000.000	177.345.430	93,33	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 3. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 4. Evaluasi terhadap penggunaan program, kegiatan serta sub kegiatan pendanaan <u>Faktor Pendukung :</u> 1. Realisasi dari semua kegiatan tersebut akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk selanjutnya akan dijadikan pedoman dan patokan terhadap besarnya pembagian Pendapatan Transfer yang akan diterima oleh masing-masing Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan selanjutnya akan didistribusikan ke masing-masing Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan jatah/porsinya masing-masing 2. Melakukan rapat koordinasi dan rekonsiliasi bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan RI di Jakarta dalam rangka membahas pelaksanaan penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Bagi Hasil Bidang Pertambangan Umum dan Dana Bagi Hasil Bidang Kehutanan 3. Melakukan rapat koordinasi bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas pada Kementerian	Bidang PDLL

										Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta dalam rangka membahas Lifting Minyak dan Gas, Bidang Pertambangan Umum, serta Dana Bagi Hasil Bidang Kehutanan	
11.	Meningkatnya Penerimaan dari Hibah	1.1	Persentase Meningkatnya Penerimaan Hibah	84,15	80,019	95,091	35.000.000	30.000.000	85,71	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 3. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 4. Evaluasi terhadap penggunaan program, kegiatan serta sub kegiatan pendanaan <u>Faktor Pendukung :</u> 1. Mengupayakan peningkatan pendapatan di sektor Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dengan mengoptimalkan dan mengintensifkan jenis-jenis pendapatan dari komponen penerimaan Lain-lain PAD yang Sah antara lain penerimaan jasa giro dari Bank Sumsel Babel dan penerimaan-penerimaan lainnya 2. Melakukan evaluasi terhadap potensi yang dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kontribusi BUMD, salah satunya dengan membuat rencana bisnis perusahaan 3. Meningkatkan koordinasi dengan BUMN maupun BUMS agar berperan aktif dan berpartisipasi dalam mendukung program pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan dilakukannya pendekatan yang intensif kepada masing-masing BUMN maupun BUMS tersebut maka diharapkan kepada masing-masing BUMN dan BUMS dapat meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Bidang PDLL
12.	Meningkatnya Level Maturitas Pengendalian Intern Pengawasan Pendapatan Daerah	1.1	Level Maturitas Pengendalian Intern (0 - 5)	3	3	100,00	260.000.000	235.522.288	90,58	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja	Bidang Wasbin

										3. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 4. Evaluasi terhadap penggunaan program, kegiatan serta sub kegiatan pendanaan <u>Faktor Pendukung</u> : 1. Pengendalian intern pemerintah dalam pengawasan pajak daerah terus ditingkatkan 2. Memantau dan mengevaluasi rencana tindak pengendalian atas pengelolaan risiko	
13.	Meningkatnya Pemeriksaan atas Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah	1.1	Persentase Meningkatnya Intensitas Pemeriksaan	92,46	84,511	91,403	100.000.000	96.120.000	96,12	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 3. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 4. Evaluasi terhadap penggunaan program, kegiatan serta sub kegiatan pendanaan <u>Faktor Pendukung</u> : 1. Pengendalian intern pemerintah dalam pengawasan pajak daerah terus ditingkatkan 2. Memantau dan mengevaluasi rencana tindak pengendalian atas pengelolaan risiko	Bidang Wasbin
14.	Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian atas Temuan Penyimpangan Pelanggaran Dalam Pendapatan Daerah	1.1	Persentase Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian	17,280	15,203	87,980	100.000.000	88.500.000	88,50	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 3. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 4. Evaluasi terhadap penggunaan program, kegiatan serta sub kegiatan pendanaan <u>Faktor Pendukung</u> : 1. Pengendalian intern pemerintah dalam pengawasan pajak daerah terus ditingkatkan	Bidang Wasbin

										2. Memantau dan mengevaluasi rencana tindak pengendalian atas pengelolaan risiko	
15.	Berkurangnya Tindakan Represif untuk Penertiban Keamanan dalam Pelaksanaan Pendapatan Daerah	1.1	Persentase Berkurangnya Tindakan Refresif	13,020	11,988	92,074	100.000.000	92.135.000	92,13	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 3. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 4. Evaluasi terhadap penggunaan program, kegiatan serta sub kegiatan pendanaan <u>Faktor Pendukung :</u> 1. Pengendalian intern pemerintah dalam pengawasan pajak daerah terus ditingkatkan 2. Memantau dan mengevaluasi rencana tindak pengendalian atas pengelolaan risiko	Bidang Wasbin
16.	Meningkatnya Penggalan Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	1.1	Persentase Meningkatnya Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	81,63	78,152	95,739	500.000.000	454.936.040	90,98	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 3. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 4. Evaluasi terhadap penggunaan program, kegiatan serta sub kegiatan pendanaan <u>Faktor Pendukung :</u> 1. Kerjasama dengan beberapa perusahaan wajib pajak PBB-KB terkait rencana investasi 2. Kolaboratif dengan DPMPTSP terkait market sounding rencana Kerjasama Pemerintah Badan Usaha 3. Kerjasama dengan Universitas terkait kajian teoritis potensi sumber pendapatan asli daerah	Bidang P2PATDA
17.	Meningkatnya Objek Penelitian Potensi Pendapatan Asli Daerah	1.1	Persentase Meningkatnya Penelitian Objek Potensi Pendapatan Asli Daerah	83,48	73,132	87,604	200.000.000	190.096.214	95,04	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja;	Bidang P2PATDA

										2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 3. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 4. Evaluasi terhadap penggunaan program, kegiatan serta sub kegiatan pendanaan Faktor Pendukung : 1. Kerjasama dengan beberapa perusahaan wajib pajak PBB-KB terkait rencana investasi 2. Kolaboratif dengan DPMPTSP terkait market sounding rencana Kerjasama Pemerintah Badan Usaha 3. Kerjasama dengan Universitas terkait kajian teoritis potensi sumber pendapatan asli daerah	
18.	Meningkatnya Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	1.1	Persentase Meningkatnya Kerjasama	93,28	85,611	91,779	500.000.000	454.936.040	90,98	Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90% 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 3. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 4. Evaluasi terhadap penggunaan program, kegiatan serta sub kegiatan pendanaan Faktor Pendukung : 1. Kerjasama dengan beberapa perusahaan wajib pajak PBB-KB terkait rencana investasi 2. Kolaboratif dengan DPMPTSP terkait market sounding rencana Kerjasama Pemerintah Badan Usaha 3. Kerjasama dengan Universitas terkait kajian teoritis potensi sumber pendapatan asli daerah 4. Memanfaatkan teknologi untuk mempermudah transaksi pembayaran pajak daerah seperti, pembayaran secara non tunai menggunakan mesin EDC, QRIS serta pengembangan pembayaran pajak melalui modern kanal	Bidang P2PATDA
19.	Deregulasi Kebijakan Dalam Penetapan	1.1	Persentase Meningkatnya Peraturan yang	100,00	91,204	91,204	312.400.000	309.937.838	99,21	Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90% 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan	Bidang P2PATDA

	Sumber Potensi		Diharmonisasi							analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 3. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 4. Evaluasi terhadap penggunaan program, kegiatan serta sub kegiatan pendanaan <u>Faktor Pendukung :</u> 1. Kerjasama dengan beberapa perusahaan wajib pajak PBB-KB terkait rencana investasi 2. Kolaboratif dengan DPMPTSP terkait market sounding rencana Kerjasama Pemerintah Badan Usaha 3. Pendampingan tim korsupgah KPK dalam optimalisasi pendapatan daerah 4. Koordinasi dan konsultasi intensif bersama Kemenkumham dan Biro Hukum 5. Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah	
20.	Meningkatnya Dukungan Sekretariat Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	1.1	Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan	100,00	92,820	92,820	175.000.000	142.532.052	81,45	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 3. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 4. Evaluasi terhadap penggunaan program, kegiatan serta sub kegiatan pendanaan <u>Faktor Pendukung :</u> 1. Kolaboratif Tim verifikator dengan BPKAD 2. Penelitian dan verifikasi semakin meningkat 3. Evaluasi dan pemantauan realisasi fisik dan keuangan melalui kurva "S" 4. Laporan keuangan yang akuntabel	Sekretariat
		1.2	Persentase Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran	5,13	4,723	92,066	250.000.000	227.712.300	91,08	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran)	Sekretariat

										berbasis kinerja; 2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 3. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 4. Evaluasi terhadap penggunaan program, kegiatan serta sub kegiatan pendanaan <u>Faktor Pendukung :</u> 1. Perhitungan efisiensi anggaran 2. Efektivitas penggunaan anggaran telah tepat sasaran 3. Evaluasi dan pemantauan program, kegiatan sub kegiatan dilakukan secara berkala 4. Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran secara berkala waktu	
		1.3	Persentase Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	80,610	73,306	90,939	300.000.000	278.630.000	92,88	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 3. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 4. Evaluasi terhadap penggunaan program, kegiatan serta sub kegiatan pendanaan <u>Faktor Pendukung :</u> 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui pendidikan formal dan informal secara bertahap	Sekretariat
21.	Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	1.1	Persentase Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	62,040	57,261	92,297	6.756.287.243	6.668.506.340	98,70	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 3. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran)	UPTB Puslia

										dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 4. Evaluasi terhadap penggunaan program, kegiatan serta sub kegiatan pendanaan <u>Faktor Pendukung :</u> 1. Memanfaatkan teknologi untuk mempermudah transaksi pembayaran pajak daerah seperti, pembayaran secara non tunai menggunakan mesin EDC, QRIS serta pengembangan pembayaran pajak melalui modern kanal 2. Kolaboratif dengan Dinas Kominfo terkait dengan internet desa 3. Berkurangnya blank spot area 4. Memperluas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penambahan titik pelayanan baru seperti samsat desa dan samsat drive thru	
22.	Meningkatnya Kerjasama Layanan Pada e commerce	1.1	Persentase Meningkatnya Kerjasama	91,120	82,362	90,388	6.756.287.243	6.668.506.340	98,70	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 3. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) <u>Faktor Pendukung :</u> 1. Memanfaatkan teknologi untuk mempermudah transaksi pembayaran pajak daerah seperti, pembayaran secara non tunai menggunakan mesin EDC, QRIS serta pengembangan pembayaran pajak melalui modern kanal (indomaret, alfa mart, tokopedia dan bli bli.com)	UPTB Puslia
23.	Meningkatnya Digitalisasi Pembayaran Pendapatan Daerah	1.1	Persentase Meningkatnya Penggunaan Digitalisasi	78,82	71,203	90,336	6.756.287.243	6.668.506.340	98,70	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 3. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran)	UPTB Puslia

										dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) <u>Faktor Pendukung :</u> 1. Pembangunan dan pengembangan aplikasi samsat bapenda, perbaikan Sistem Informasi Manajemen (SIM) terkait pengolahan, pengamanan dan up grading data serta peralatan pengolahan data yang lebih canggih dan modern 2. Pengembangan Aplikasi E-Samsat berupa Layanan Samsat Online Nasional dan Layanan Samsat Online Sumsel 3. Secara berkala melaksanakan rapat koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Sumatera Selatan untuk membahas kendala dan permasalahan yang timbul di lapangan	
24.	Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	1.1	Persentase Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	41,230	38,205	92,663	6.756.287.243	6.668.506.340	98,70	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 3. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) <u>Faktor Pendukung :</u> 1. Pembangunan dan pengembangan aplikasi samsat bapenda, perbaikan Sistem Informasi Manajemen (SIM) terkait pengolahan, pengamanan dan up grading data serta peralatan pengolahan data yang lebih canggih dan modern 2. Pengembangan Aplikasi E-Samsat berupa Layanan Samsat Online Nasional dan Layanan Samsat Online Sumsel 3. Secara berkala melaksanakan rapat koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Sumatera Selatan untuk membahas kendala dan permasalahan yang timbul di lapangan 4. Kerjasama dengan Disdukcapil terkait pemanfaatan data KTP dan keamanan informasi	UPTB Puslia
25.	Meningkatnya Kecepatan Internet	1.1	Kecepatan Layanan Internet up to 100 MBPs	100,00	100,00	100,00	6.756.287.243	6.668.506.340	98,70	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan	UPTB Puslia

										analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 3. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) <u>Faktor Pendukung :</u> 1. Pembangunan dan pengembangan aplikasi samsat bapenda, perbaikan Sistem Informasi Manajemen (SIM) terkait pengolahan, pengamanan dan up grading data serta peralatan pengolahan data yang lebih canggih dan modern 2. Pengembangan Aplikasi E-Samsat berupa Layanan Samsat Online Nasional dan Layanan Samsat Online Sumsel 3. Secara berkala melaksanakan rapat koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Sumatera Selatan untuk membahas kendala dan permasalahan yang timbul di lapangan	
26.	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	1.1	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Terhadap Target	100,00	92,362	92,362	1.400.000.000	1.296.714.390	92,62	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 3. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) <u>Faktor Pendukung :</u> 1. Pelaksanaan door to door service 2. Pelaksanaan razia pajak daerah 3. Pelaksanaan optimalisasi pendapatan daerah	UPTB PPD Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan
27.	Berkurangnya Tunggalan Pajak Daerah	1.1	Persentase Berkurangnya Tunggalan Pajak	10,530	9,874	93,770	310.000.000	235.169.965	75,86	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 3. Perhitungan nilai efisien sumber daya	UPTB PPD Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan

										(anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) <u>Faktor Pendukung</u> : 1. Pelaksanaan door to door service 2. Pelaksanaan razia pajak daerah 3. Pelaksanaan optimalisasi pendapatan daerah	
28.	Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	1.1	Persentase Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	9,330	8,601	92,186	980.000.000	826.114.937	84,29	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 3. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) <u>Faktor Pendukung</u> : 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui pendidikan formal dan informal secara bertahap 2. Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor telah di update dalam system informasi pembayaran pajak daerah 3. Mengendalikan tindak pengendalian atas perhitungan beban tariff pajak, denda pajak dan bunga pajak 4. Kolaboratif bersama dengan pihak Kepolisian dalam penertiban kendaraan bermotor	UPTB PPD Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan

